

ABSTRAK

Jamilah Rosyadah (1168010138) Implementasi Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Balai Diklat Keagamaan Bandung

Pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara bertujuan untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pemberharu dan perekat pemersatu dan kesatuan bangsa, hal tersebut perlu dilakukannya pendidikan dan pelatihan yang dimana pendidikan dan pelatihan merupakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan dilandasi kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi.

Salah satu badan pendidikan dan pelatihan yang berada di Wilayah Jawa Barat lebih tepatnya yang berada di Kota Bandung yaitu Balai Diklat Keagamaan Bandung atau yang sering di sebut dengan BDK Bandung. Dalam melaksanakan kegiatan diklat, tenaga diklat pelatih yang melaksanakan kepanitian harus memiliki jumlah tenaga diklat sebanyak 40% sesuai dengan apa yang di keluarkan dalam pedoman PERKALAN No. 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah namun di BDK tenaga diklat hanya 10%.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi Peraturan LAN No.12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan CPNS dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam dimensi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementer untuk menentukan pengimplementasian kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan LAN No.12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan CPNS dapat terimplementasikan namun belum optimal, hal ini dibuktikan dari enam dimensi yang digunakan sebagai tolak ukur implementasi, tiga diantaranya standar dan sasaran kebijakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementer, sedangkan dimensi yang kurang optimal tiga diantaranya yaitu sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas serta karakteristik agen pelaksan

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan, CPNS, Sumberdaya

ABSTRACT

Jamilah Rosyadah (1168010138) Implementation of Regulation of the State Administrative Institution of the Republic of Indonesia Number 12 of 2018 concerning Basic Training of Prospective Civil Servants in the Bandung Religious Training Center.

Education and training of the state civil apparatus aims to create an apparatus that is able to act as a reformer and adhesive unifying and unity of the nation, it is necessary to conduct education and training where education and training is an improvement of knowledge, skills, and attitudes to carry out the task of office oprasionally based on the ethical personality of civil servants in accordance with the needs of isntansi.

One of the educational and training bodies located in the West Java Region is more precisely located in the city of Bandung, namely the Bandung Religious Training Center or often referred to as BDK Bandung. In carrying out training activities, trainers who carry out training must have a total of 40% training personnel in accordance with what is issued in the guidelines of the United Nations No. 25 of 2015 on Accreditation Guidelines of Government Education and Training Institutions but in BDK training personnel only 10%.

This study uses descriptive research method that aims to describe how the implementation of LAN Regulation No.12 of 2018 on CPNS Training with the type of data used is qualitative data and data collection techniques are conducted by means of observation, interview, literature study and documentation.

The theory used is the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn consisting of six dimensions, namely standards and objectives of policies, resources, communication between organizations and activity boosters, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions, and the disposition of implementers to determine policy implementation.

The results showed that the implementation of LAN Regulation Policy No.12 of 2018 on CPNS Training can be implemented but not optimal, this is evidenced from the six dimensions used as a benchmark of implementation, three of which are standards and targets of policy, social, economic and political conditions, as well as the disposition of implementers, while the dimensions are less than optimal three of which are resources, communication between organizations and activity boosters and characteristics of implementing agents

Keywords: Implementation of Policies, Regulations, CPNS, Resources